

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia telah melalui sebuah pesta demokrasi pada 17 April 2019 yang lalu. Hiruk pikuk dan lalu lalang informasi mengenai kontestan pemilihan umum telah terasa sejak 2 tahun yang lalu. Hal ini terutama disebabkan oleh kontestasi pemilihan Presiden yang secara umum tidak berbeda dari 2014 dimana Joko Widodo sebagai calon Presiden pertengahan menghadapi Prabowo Subianto juga pada tahun 2019. Kedua Aktor ini seolah telah mewakili 2 kelompok dalam polarisasi politik yang terasa terutama di pemberitaan dan media sosial. Sebagaimana dikatakan oleh Ross Tapsell (2018) pasca pemilihan Presiden 2014 dan pemilihan Gubernur DKI tahun 2017 dunia maya begitu ramai dengan *buzzer* dan berita bohong sehingga masyarakat merasakan polarisasi yang lebih besar daripada kenyataannya. Hal ini pada dasarnya dapat dilihat sebagai upaya dari masing-masing pendukung untuk mendapatkan simpati masyarakat, yang dengan kata lain adalah upaya kampanye politik.

Masing-masing aktor politik yang berkontestasi ini telah melakukan kampanye politik untuk mendapatkan kekuasaan sebagai presiden. Kampanye politik menurut Arifin (2003) adalah bentuk komunikasi politik yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang atau organisasi politik dalam waktu tertentu untuk memperoleh dukungan politik dari masyarakat. Sebagaimana definisi tersebut dapat dilihat bahwa Joko Widodo bersama Ma'ruf Amin melakukan kampanye politik, begitu pula Prabowo Subianto bersama Sandiaga Salahudin Uno. Kedua kelompok yang berkontestasi ini pun memiliki tim untuk menjalankan kampanye politiknya masing-masing. Dari sisi Jokowi-Ma'ruf ada TKN (Tim Kampanye Nasional) yang diketuai Erick Tohir, sementara dari sisi Prabowo-Sandi ada BPN (Badan Pemenangan Nasional) dimana Djoko Santoso sebagai

ketuanya. Tim-tim tersebut bertugas mengoperasikan strategi-strategi kampanye mulai dari perencanaan hingga operasional kampanye.

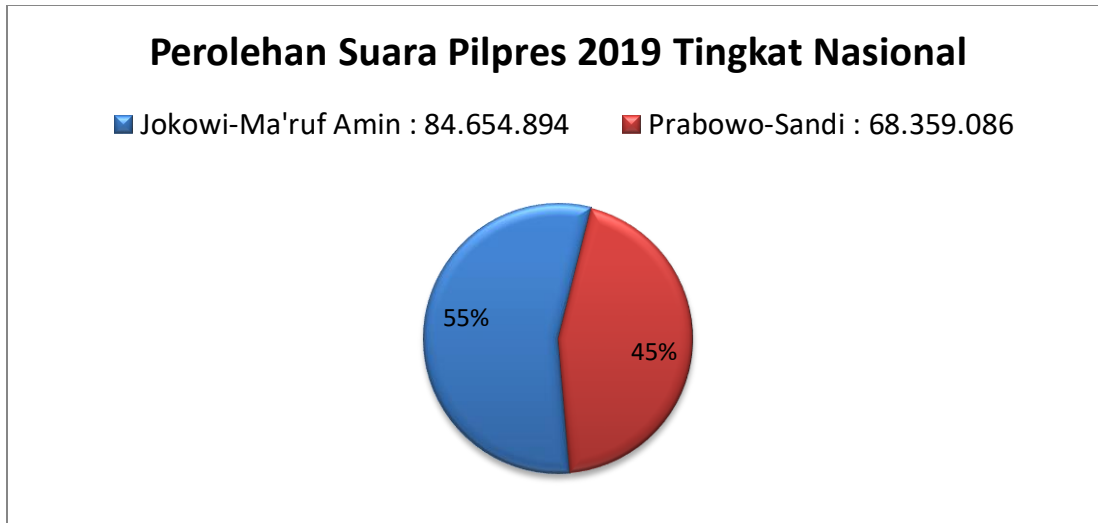
Dalam menjalankan kegiatan kampanye politiknya, TKN selalu muncul selama masa kampanye. TKN selalu menggunakan berbagai media terutama di televisi dan media sosial. Masing-masing kubu memiliki juru bicara masing-masing yang kerap dihadapkan di televisi. Beberapa acara televisi populer tak luput dijadikan panggung mereka seperti Mata Najwa di Trans TV, Rosi di Kompas TV, hingga Indonesia *Lawyers Club* di TV One. Selain itu beberapa tokoh publik media sosial pun diikut sertakan untuk meramaikan wacana di media sosial baik dengan mengedepankan kelebihan pasangan yang mereka usung atau pun untuk mengkritik pasangan lawan.

Selain aktif di media nasional dan media sosial, TKN juga membentuk tim di daerah-daerah tak terkecuali di Kota Jambi. Anggota tim kampanye ini pun terdiri dari lapisan tokoh partai ataupun tokoh masyarakat. Tim-tim ini dapat dilihat telah membuat dan menyebarkan berbagai alat peraga mulai dari stiker hingga Spanduk di Papan Bilboard di jalan-jalan utama di Kota Jambi selama masa kampanye berlangsung.

Sebagai hasil kerja dari tim kampanye, terdapat fakta menarik dari hasil akhir perolehan suara khususnya pada pemilihan umum presiden tahun 2019 di Kota Jambi. Jika TKN di tingkat Nasional mampu memenangkan pasangan Jokowi - Ma'Ruf dengan perolehan 84.654.894 suara atau setara 55,32%, di Kota Jambi justru pasangan ini kalah jauh.

Berikut gambar Perolehan Suara Pilpres 2019 Tingkat Nasional:

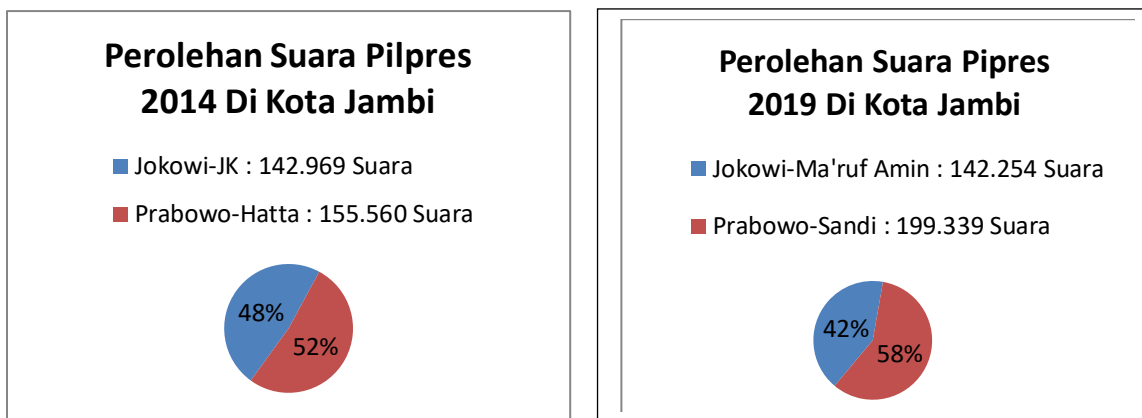
Gambar 1.1 Perolehan Suara Pilpres 2019 Tingkat Nasional



Sumber : <https://pemilu2019.kpu.go.id/#ppwp/hitung-suara/>

Sedangkan untuk tingkat Kota Jambi, pada Pemilu 2014 Jokowi meraih 142.969 suara (48%), dan pada Pemilu 2019 Perolehan suara Jokowi di Kota Jambi turun menjadi 142.254 suara (42%).

Gambar 1.2 Perolehan Suara Pilpres 2014 dan 2019 Di Kota Jambi



Sumber : <https://pemilu2019.kpu.go.id/#ppwp/hitung-suara/>

Tentunya ada masalah yang terjadi, sehingga terjadi penurunan pada perolehan suara Joko Widodo – Ma'ruf Amin di Kota Jambi yang justru berkebalikan dengan kenaikan suara Jokowi – Ma'ruf Amin di Tingkat Nasional. Masalah inilah yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian. Peneliti ingin mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja dari strategi

kampanye politik yang digunakan TKD Kota Jambi sehingga terjadi penurunan perolehan suara pada Pemilu Presiden dan Wakil presiden 2019.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian, yaitu dalam bentuk skripsi penelitian dengan judul:

”ANALISIS FAKTOR PENYEBAB MENURUNNYA PEROLEHAN SUARA TIM KAMPANYE DAERAH JOKO WIDODO – KH. MA’RUF AMIN DALAM PEMILHAN UMUM PRESIDEN TAHUN 2019 DI KOTA JAMBI ”

1.2 Rumusan Masalah

Dari Latar Belakang di atas penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu apa penyebab menurunnya perolehan suara TKD Joko Widodo – Kh. Ma’ruf Amin Kota Jambi pada pilpres 2019 ?

1.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah masalah-masalah yang terjadi pada strategi kampanye politik yang digunakan oleh TKD Kota Jambi pada Pilpres 2019.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan penyebab menurunnya perolehan suara Tim Kampanye Daerah Joko Widodo – Ma’ruf Amin pada Pilpres 2019 di Kota Jambi. Dengan demikian penelitian ini juga diharapkan dapat mengembangkan studi tentang strategi kampanye politik. Selain itu penelitian ini juga ditulis untuk dijadikan tugas akhir sebagai syarat mencapai gelar sarjana pendidikan kewarganegaraan.

1.5 Manfaat Penelitian

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat bagi peneliti dalam rangka menerapkan teori-teori yang diterima selama kuliah.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dikembangkan lebih lanjut oleh peneliti yang lain, yang tertarik pada masalah strategi kampanye politik.

1.6 Definisi istilah

Berdasarkan fokus dan rumusan masalah penelitian, maka uraian definisi istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pemilihan Umum

Pemilu merupakan instrument untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk pemerintahan yang absah serta sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat. Sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, maka pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil demi terwujudnya demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan dan persamaan di depan hukum.

Dalam undang-undang no. 42 Tahun 2008 pasal 9 juga diatur pasangan calon presiden dan wakil presiden harus diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR (560 kursi) atau memperoleh 25% dari suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR sebelum pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden.

2. Perolehan Suara

Setiap pemilihan umum memiliki proses yang panjang mulai dari penentuan calon peserta, tahapan kampanye, hari pemungutan suara yang menjadi penentu pemenang. Dalam pemilihan Presiden, Indonesia memilih metode penghitung suara bernama Majolitarian atau dinyatakan menang jika mendapatkan suara mayoritas, dan model ini tetap dipakai sampai sekarang di Pemilu 2019. Majolitarian ini mulai dipergunakan sejak pemilu pertama era

reformasi 1999, karena Indonesia mengubah model penyelenggaraan dengan sistem pemilihan langsung untuk pemilu presiden.

3. Tim Kampanye

Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik (Koalisi Partai) yang mengusulkan Pasangan Calon, yang didaftarkan ke KPU dan bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye.